

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

LAKIP



INSPEKTORAT
2022

BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. GAMBARAN UMUM OPD

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data kepegawaian Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 jumlah pegawai sebanyak 57 orang yang terdiri dari 8 orang pejabat struktural , Pejabat Fungsional/Auditor 34 orang staf dan 16 orang JFU. Staf/PTT 14 orang Kondisi sumber daya manusia pada Inspektorat kabupaten polewali mandar dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

Jumah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional		
	S2	31	IV/c	2	Eselon II.a	1
	S1	26	IV/b	10	Eselon III.a	5
	D3	-	IV/a	2	Eselon III.b	-
	D2	-	III/d	14	Eselon IV.a	2
	SLTA	-	III/c	6	Eselon IV.b	0
	SLTP	-	III/b	10	Pelaksana (Staf)	13
	SD	-	III/a	13		
			II/d			
			II/c			
			II/b			
			II/a	-		
			I/b	-		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian inspektorat kabupaten polewali mandar 2023

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	PNS	Staf/PTT
1.	57 Orang	14 Orang

a. Perlengkapan / Asset

Secara garis besar perlengkapan / asset yang ada dan dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas 6 bagian yaitu :

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan bangunan,
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan



Tabel 1.3. Rekapitulasi Daftar Aset Inspektorat kabupaten Polewali Mandar

No.	NamBarang	Nilai	Ket.
1.	Tanah		
2.	Peralatan dan Mesin Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan		
3.	Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Monumen	1,495,600,000,	-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air/ Irigasi Instalasi Jaringan	21,652,400,-	
5.	Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan	2.000.000,-	
6.	Hewan dan Ternak serta Tanaman Aset Renovasi Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-	

.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun fungsi dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah unsur pelaksana tugas pemerintah kabupaten dalam bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggungjawab kepada Bupati. Inspektorat merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi.

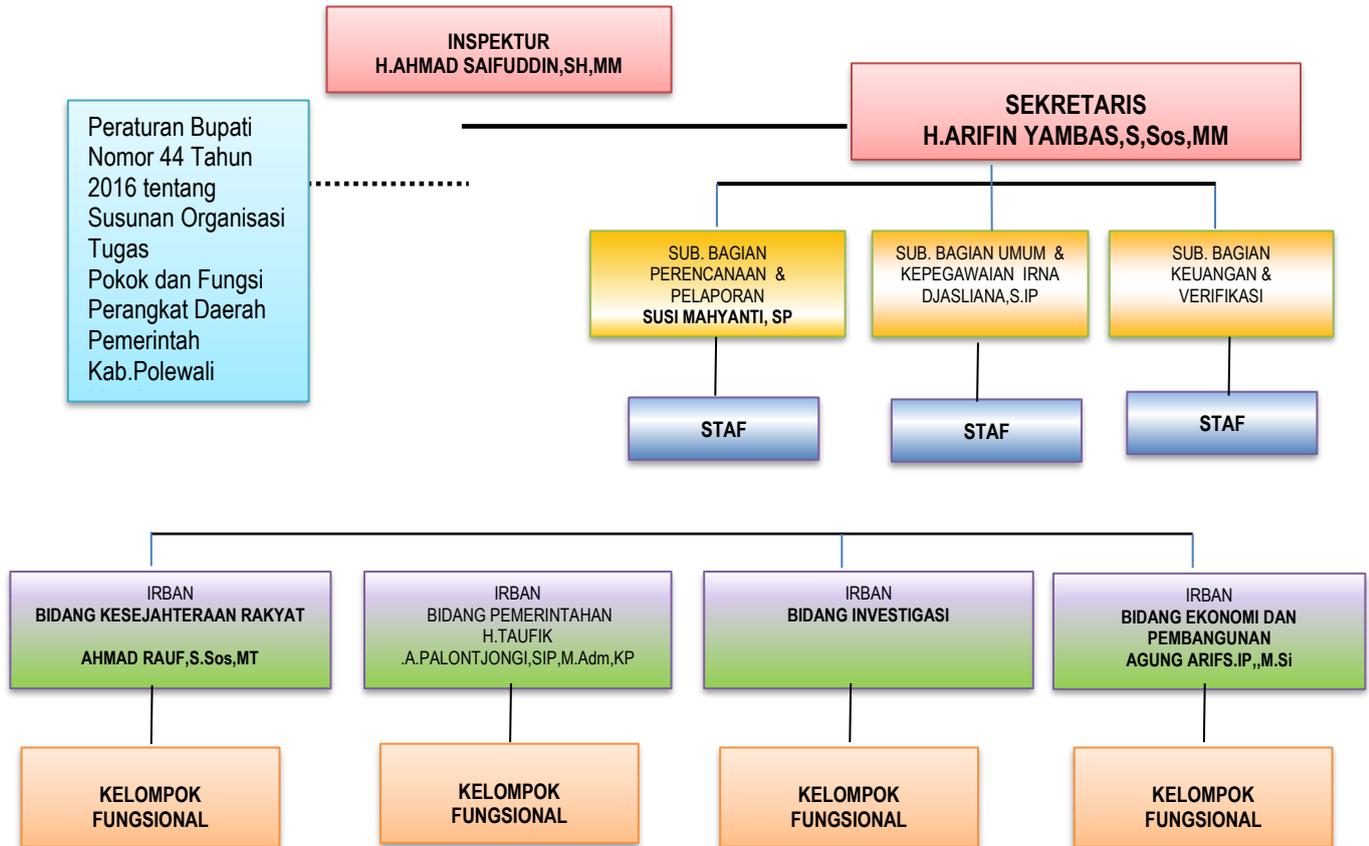
- a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya ;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
 - Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan , DPRD Dan Penanganan Khusus;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dapat di gambarkan sebagai berikut :





.2. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/ Badan/ Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya maupun Eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai lembaga pengawasan eksternal.

Memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan Negara. Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dibidang pengawasan yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat, yaitu :

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Adanya tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP megakibatkan fungsi dan kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2019-2024 ditargetkan pada tahun 2022 Inspektorat selaku APIP sudah berada pada level 3. Kondisi ini harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.

2. Penerapan SPIP di setiap Perangkat Daerah masih lemah.

Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh SKPD.

Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. APIP juga dituntut melaksanakan penilaian maturitas SPIP pada instansi sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2019-2023. Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi SPIP ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2022.

3. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah adalah mendapatkan opini WTP dari BPK, maka menjadi tantangan bagi Inspektorat dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk mempertahankan opini WTP dari BPK untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk itu perlu perhatian serius seluruh stakeholder terkait agar peran Inspektorat saat ini dan kedepan dalam melaksanakan Reviu Laporan Keuangan dapat didukung dengan optimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Kuantitas Dan Kualitas SDM Yang Belum Memadai

Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai untuk melaksanakan pemeriksaan regular, penanganan kasus, dan berbagai tugas pengawasan yang semakin banyak dan menjadi mandat (mandatory) yang harus dilaksanakan seperti revidu dan evaluasi. Kondisi ini memerlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan. Kompetensi untuk melakukan pengawasan dibuktikan dengan kemampuan melakukan audit, revidu, evaluasi, investigasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Untuk itu diperlukan pelatihan dan diklat terhadap SDM bidang pengawasan untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan pengawasan yang semakin berkembang pesat saat ini.

5. Belum Optimalnya Sarana Dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pengawasan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat diharapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar sangat memprihatinkan dan jauh dari standar.

Dasar Hukum



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas & Fungsi serta tata kerja perangkat Daerah Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan menjelaskan pencapaian kinerja OPD dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 untuk menjadi acuan dan perbandingan dalam perbaikan kinerja dimasa mendatang, dibuat dengan sistematika berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Anggaran Tahun 2022 merupakan suatu implimentasi tahapan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dengan mengacu kepada Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instransi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari didalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian besar harapan kami agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) INSPEKTORAT Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan yang membutuhkannya.

Polewali, 25 Februari 2023



H. AHMAD SAIFUDDIN, SH., MM
Pangrehat Pembina Utama Muda
NIP . 19651231 200003 1 084



B A B

WISUDA

CGGCAE

DAI

CI

ASI MENC

BANGU



BAB II

Perencanaan Kineja

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Kabupaten Polewali Mandar sebagai representasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. dan merupakan gambaran cita-cita serta harapan masyarakat yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

“Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi di atas perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius
2. Memperluas kemadirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegritas serta berwawasan lingkungan.
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan moderen;



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut dan menunjukkan apa yang menjadi cita-cita dan layanan terbaik Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, maka dirumuskan suatu visi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019–2024 adalah sebagai berikut :

VISI

Adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, maka ditetapkan **Visi** yaitu :

“Polewali Mandar maju Rakyat Sejahtera”

Dalam visi ini terkandung maksud bahwa berkeinginan untuk mengantisipasi tantangan, perkembangan dan tuntutan masyarakat, mendorong Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar untuk mempersiapkan diri tetap eksis dalam proses pembangunan. Namun perbaikan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan menekan terjadinya kebocoran keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMD) 2019–2024. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan

MISI

1. Meningkatkan Citra, Harkat Dan Martabat Aparatur Pemerintah Yang Didukung Oleh SDM Yang Berkualitas
2. Meningkatkan SDM Aparatur Pengawasan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Dibidang Pengawasan
3. Meningkatkan Fungsi Pengawasan, Baik Pengawasan Fungsional Maupun Pengawasan Masyarakat
4. Meningkatkan Sistem Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Sejalan dengan visi maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu.

Beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar adalah :

Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi : Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional Berkualitas Transparan Dan Terpercaya			
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP
		Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan

2.3. Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dasar hukum penetapan IKU pada instansi pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER / 09 / M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel. 2.2. Indikator Kinerja Utama

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	$n = \frac{\text{Jumlah OPD Yg Menerapkan SPIP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Sekretariat
2.	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	$n = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Auditor}}{\text{Jumlah JFA berkompeten bid. pengawsan}} \times 100\%$	Sekretariat
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Hasil Penilaian	Sekretariat
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian	Sekretariat
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	Hasil Pemeriksaan BPK RI	Sekretariat



Tabel 2.1 Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	13,64%	20,45%	27,27%	31,82%	38,64%	45,45%	45,45%	45,45%
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3						
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
5.	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Lakip 2022



TUJUAN : Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

INDKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SASARAN
1

TERWUJUDNYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

IKU 1

Presentase Perangkat Daerah Yang Penerapkan SPIP

SASARANN
2

MENINGKATNYA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG BERKOMPTEN DALAM BIDANG PENGAWASAN

IKU 2

Tingkat Kapabilitas APIP

SASARAN
3

MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN PERKANTORAN

IKU 3

Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

SASARAN
4

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS SATUN KERJA

IKU 4

Predikat Sakip Perangkat Daerah

SASARAN
5

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLA KEUANGAN OPD

IKU 5

Opini Pengelolaan Keuangan



PERJANJIAN KINERJA

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2022	TERWUJUDNYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)	Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP	38,64
	MENINGKATNYA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
	MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN PERKANTORAN	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	BAIK
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS SATUN KERJA	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLA KEUANGAN OPD	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP

Proses Bisnis Inspektorat



Landasan Operasional Pelaksanaan Perumusan Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

MISI : 4 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Moderen

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2018. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Tujuan

Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Sasaran Strategis

Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern

Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Meningkatnya Akuntabilitas Satun Kerja

Meningkatnya Kualitas Pengelola Keuangan Opd

Indikator Sasaran

Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan

Tingkat Kapabilitas Apip

Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder

Predikat Sakip Perangkat Daerah

Opini Pengelolaan Keuangan

CASCADING KINERJA INSPEKTORAT

VISI Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera

MISI 4 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Moderen

Inspektor

TUJUAN

Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

RPJMD

INSPEKTORAT

Program Penyelenggaraan Pengawasan

2019	2020	2021	2022	2023
6 OPD	24 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD

Indikator Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2019	2020	2021	2022	2023
20,45	27,27	31,83	38,64	45,45

SASARAN 1. Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP

2019	2020	2021	2022	2023
27,27	27,59	31,83	38,64	45,45

Program Penyelenggaraan Pengawasan

2019	2020	2021	2022	2023
45 OPD				

Indikator Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Berkompeten Dalam Bidang Pengawasan

2019	2020	2021	2022	2023
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

SASARAN 2. Tingkat Kapabilitas APIP

2019	2020	2021	2022	2023
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Inspektur

TUJUAN MENINGKATNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH AKUNTABEL DAN MODERN

INSPEKTORAT

Indikator Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran				
2019	2020	2021	2022	2023
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

SASARAN 3 Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder				
2019	2020	2021	2022	2023
Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Program Penyelenggaraan Pengawasan				
2019	2020	2021	2022	2023
42 OPD	42 OPD	42 OPD	42 OPD	42 OPD

Indikator Meningkatkan Kualitas Pengelola Keuangan OPD				
2019	2020	2021	2022	2023
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Program Penyelenggaraan Pengawasan				
2019	2020	2021	2022	2023
42 OPD	42 OPD	42 OPD	42 OPD	42 OPD

Indikator Meningkatkan Akuntabilitas Satun Kerja				
2019	2020	2021	2022	2023
B	BB	BB	BB	A

SASARAN 4. Predikat Sahip Perangkat Daerah				
2019	2020	2021	2022	2023
B	BB	BB	BB	A

Program Penyelenggaraan Pengawasan				
2019	2020	2021	2022	2023
42 OPD	42 OPD	42 OPD	42 OPD	42 OPD

SASARAN 5. Opini Pengelolaan Keuangan				
2019	2020	2021	2022	2023
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan

1. Sekretaris
2. Irabn Bidang Pemerintahan
3. Irban Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Irban Bidang Kesejahteraan Rakyat
5. Irban Bidang Investigasi
6. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
7. Kasubg Umum & Kepegawaian
8. Kasubag Keuangan & Perifikasi



2.3.1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat program, kegiatan dan seluruh target kerja yang hendak dicapai dalam setahun yang akan datang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci yang meliputi indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan.

Tabel. 2.4. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis pada Renstra Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	persen	13,64	20,45	27,27	31,82	38,64	45,45
	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Skor	B	B	BB	BB	BB	A
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Wahid Hasyim. No. 12, Kel.Pekkabata, Kec.Polewali
Telp.(0428) 21201 / Faks. (0428) 21201, KodePos 91315
E-mail : inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM**
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

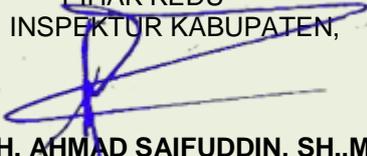
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,


H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,


H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19701229 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	A. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	98%	100%
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- 54 LHP	- 38 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	-	- 4 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah	- 24 LHR	- 24 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah	- 3 LHR	- 1 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	- 24 LHP
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	-	- 4 Dok
		- Jumlah penyelesaian Tindak Lanjut dan Temuan BPK, BPKP dan Inspektorat	- 25 LHP	- 5 Dok
		B. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	98%	100%
		- Jumlah penyelesaian kerugian Negara yang ditindaklanjuti	-	3 LHP
		- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	- 27 LHP
		C. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten	100%	100%
		- Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	-	- 12 Dok
		- Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Reformasi Birokrasi	-	- 1 Dok
		- Jumlah koordinasi dan Monev yang tersedia	-	- 4 Lap
		- Jumlah dokumen Asistensi, verifikasi Penegakan Integritas yang tersedia	- 12 dok	- 4 Dok

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
2.	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	100%
		- Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor dan Penjenjangan	12 dok	57 org
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	A. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	83%	100%
		- Jumlah jenis komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang digunakan	6 jenis	3 jenis
		- Jumlah makan minum yang tersedia	25 paket	1 paket
		- Jumlah jenis cetak dan penggandaan	2 jenis	2 jenis
		- Jumlah jenis bahan bacaan	3 jenis	3 jenis
		- Jumlah alat tulis kantor	17 jenis	17 jenis
		- Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	54 lap	155 lap
		B. Persentase Tertib Adminitrasi Kantor	100%	100%
		- Jumlah jenis Meubeler	2 jenis	4 jenis
		- Jumlah alat komputer yang tersedia	2 unit	13 unit
		C. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	95%	100%
		- Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola	959 rat	1300 surat
		- Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	3 jenis	3 jenis
		- Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	1600 mr2	4000 m2
		D. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	97%	100%
		- Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi izin	7 unit	15 unit
		- Jumlah unit peralatan kantor yang terpelihara	3 unit	7 jenis
		- Jumlah jenis komputer yang terpelihara	-	8 unit

Lakip 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Persentase Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standard dan Tepat Waktu	100%	100%
		- Jumlah dokumen Renja/Perubahan Renja Tahunan yang tersusun sesuai standard dan tepat waktu	- 1 dok	- 1 dok
		- Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)	- 1 dok	- 1 dok
		- Jumlah Dokumen Perubahan RKA	-	- 1 dok
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standard dan Tepat Waktu	99%	100%
		- Jumlah ASN yang masuk dalam daftar gaji/ampra gaji bulanan dalam satu tahun	- 46 org	- 49 org
		- Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	- 32 dok	- 3 dok



NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp.2.264.585.100,-	
	- Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Rp.656.302.300,-	APBD
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp.154.967.900,-	APBD
	- Reviu Laporan Kinerja	Rp.313.840.000,-	APBD
	- Reviu Laporan Keuangan	Rp.169.993.200,-	APBD
	- Pengawasan Desa	Rp.687.874.400	APBD
	- Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 31.750.000,-	APBD
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp.249.857.300,-	APBD
	B. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp.867.748.100,-	
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp. 31.229.600,-	APBD
	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp.836.518.500,-	APBD
	C. Pendampingan dan Asistensi	Rp.200.808.200,-	
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.4.008.200,-	APBD
	- Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp.22.636.400,-	APBD
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp.77.755.300,-	APBD
	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp.96.408.300,-	APBD
2.	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.218.650.000,-	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.218.650.000,-	APBD
3.	A. Administarsi Umum Perangkat Daerah	Rp.157.965.200,-	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.336.500,-	APBD
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.12.735.000,-	APBD
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.14.778.000,-	APBD
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 3.840.000,-	APBD
	- Penyediaan Bahan /Material	Rp.16.441.000,-	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp107.834.700,-	APBD

Lakip 2022

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
	B. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.76.389.100,-	
	- Pengadaan Meubel	Rp.30.916.100,-	APBD
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.45.473.000,-	APBD
	C. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.155.039.800,-	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.155.039.800,-	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.14.866.850,-	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.29.999.800,-	APBD
	D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.49.731.400,-	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.17.265.000,-	APBD
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp.16.466.400,-	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	Rp.16.000.000,-	APBD
4.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.16.785.600,-	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.8.087.100,-	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.3.671.200,-	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.3.712.800,-	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.1.314.500,-	APBD
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.6.816.238.161,-	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.6.812.190.961,-	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 4.047.200,-	APBD
JUMLAH		Rp.10.868.807.311,-	

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,



H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,



H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP 19701229 199203 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Wahid Hasyim. No. 12, Kel.Pekkabata, Kec.Polewali
Telp.(0428) 21201 / Faks. (0428) 21201, KodePos 91315
E-mail : inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD RAUF, S.Sos.,MT**
Jabatan : Irban Bid. Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
IRBAN BID. KESEJAHTERAAN RAKYAT,

AHMAD RAUF, S.Sos.,MT
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP 19651215 200003 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	A. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	98%	100%
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	54 HP	10 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	-	1 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah	24 HR	6 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	6 LHP
		B. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten	100%	100%
		- Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	-	3 Dok

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
	- Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah		APBD
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		APBD
	- Reviu Laporan Kinerja		APBD
	- Pengawasan Desa		APBD
	B. Pendampingan dan Asistensi		
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		APBD
JUMLAH		

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDU
INSPEKTUR KABUPATEN,

PIHAK PERTAMA
IRBAN BID. KESEJAHTERAAN RAKYAT,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19651231 200003 1 084

AHMAD RAUF, S.Sos.,MT
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP :19651215 200003 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Wahid Hasyim. No. 12, Kel.Pekkabata, Kec.Polewali
Telp.(0428) 21201 / Faks. (0428) 21201, KodePos 91315

E-mail : inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. TAUFIK A. PALONTJONGI, SIP.M.Adm.KP**
Jabatan : Irban Bid. Pemerintahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
IRBAN BID. PEMERINTAHAN

H. TAUFIK A. P., SIP.M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP :19690609 199112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	A. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	98%	100%
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawaasaan Kinerja Pemerintah Daerah	- 54 LHP	- 10 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	-	- 1 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah	- 24 LHR	- 6 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	- 6 LHP
		B. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten	100%	100%
		- Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	-	- 3 Dok
		- Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Reformasi Birokrasi	-	- 1 Dok

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
	- Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah		APBD
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		APBD
	- Reviu Laporan Kinerja		APBD
	- Pengawasan Desa		APBD
	B. Pendampingan dan Asistensi		
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		APBD
	- Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		APBD
JUMLAH		-----	

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
IRBAN BID. PEMERINTAHAN

H. TAUFIK A. P., SIP.M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP :19690609 199112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Wahid Hasyim. No. 12, Kel.Pekkabata, Kec.Polewali
Telp.(0428) 21201 / Faks. (0428) 21201, KodePos 91315

E-mail : inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAHAR, S.Sos.,M.S.P**
Jabatan : Irban Bid. Investigasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN.

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
IRBAN BID. INVESTIGASI

BAHAR, S.Sos.,M.S.P
Pangkat : Penata Tk.I
NIP 19681231 200701 1 419

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN N 2021	TARGET 2022
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	D. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	98%	100%
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- 54 LHP	- 9 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	-	- 1 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah	- 24 LHR	- 6 Lap
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	- 6 LHP
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	-	- 4 Dok
		E. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	98%	100%
		- Jumlah penyelesaian kerugian Negara yang ditindaklanjuti	-	3 LHP
		- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	- 27 LHP
		F. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten	100%	100%
		- Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	-	- 3 Dok

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	D. Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
	- Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah		APBD
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		APBD
	- Reviu Laporan Kinerja		APBD
	- Pengawasan Desa		APBD
	- Kerjasama Pengawasan Internal		APBD
	E. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		APBD
	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		APBD
	G. Pendampingan dan Asistensi		
	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		APBD
JUMLAH	

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP :19651231 200003 1 084

Polewali, Januari 2022
PIHAK PERTAMA
IRBAN BID. INVESTIGASI

BAHAR, S.Sos.,M.S.P
Pangkat : Penata Tk.I
NIP 19681231 200701 1 419



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Wahid Hasyim. No. 12, Kel.Pekkabata, Kec.Polewali

Telp.(0428) 21201 / Faks. (0428) 21201, KodePos 91315

E-mail : inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUNG ARIF, S.IP.,M.Si**
Jabatan : Irban Bid. Ekonomi dan Pembangunan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar

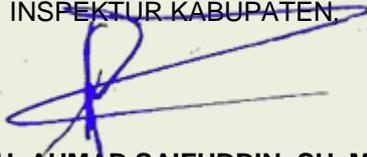
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN


H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
IRBAN BID. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN,


AGUNG ARIF, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19700809 199101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	C. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	98%	100%
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		- 54 LHP	- 9 Lap	
- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah		-	- 1 Lap	
- Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Pemerintah Daerah		- 24 LHR	- 6 Lap	
- Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemerintah Daerah		- 3 LHR	- 1 Lap	
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		-	- 6 LHP	
D. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten		-	100%	
- Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		-	- 3 Dok	

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
-	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah		APBD
-	Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah		APBD
-	Reviu Laporan Kinerja		APBD
-	Reviu Laporan Keuangan		APBD
-	Pengawasan Desa		APBD
	B. Pendampingan dan Asistensi		
-	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		APBD
Jumlah		

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
INSPEKTUR KABUPATEN,

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 200003 1 084

PIHAK PERTAMA
IRBAN BID. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN,

AGUNG ARIF, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19700809 199101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Wahid Hasyim. No. 12, Kel.Pekkabata,
Kec.PolewaliTelp.(0428) 21201 / Faks. (0428) 21201,
KodePos 91315

E-mail : inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRNA DJASLIANA, S.Sos.,M.A.P**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM**
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

IRNA DJASLIANA, S.Sos.,M.A.P

Pangkat : Penata
NIP : 19820803 200604 2 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN INPEKTORAT KAB. POLEWALI MANDAR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	H. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	98%	100%
		- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	-	- 1 LHP
		- Jumlah penyelesaian Tindak Lanjut dan Temuan BPK, BPKP dan Inspektorat	- 25 LHP	- 25 LHP
		I. Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Kompeten	100%	100%
		- Jumlah koordinasi dan Monev yang	-	- 14 dok
		- Jumlah dokumen Asistensi, verifikasi	- 12 dok	- 5 Dok
2.	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100%	100%
		- Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor dan Penjengjangna	- 12 dok	- 48 org
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	E. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	83%	100%
		- Jumlah jenis komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang digunakan	- 6 jenis	- 3 jenis
		- Jumlah makan minum yang tersedia	-25 paket	- 5 paket
		- Jumlah jenis cetak dan penggandaan	- 2 jenis	- 2 jenis
		- Jumlah jenis bahan bacaan	- 3 jenis	- 3 jenis
		- Jumlah alat tulis kantor	- 17 jenis	- 17 jenis
		- Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	- 54 laporan	- 54 laporan
		F. Persentase Tertib Adminitrasi Kantor	100%	100%
		- Jumlah jenis Meubeler	- 2 jenis	- 2 jenis
		- Jumlah alat komputer yang tersedia	- 2 unit	- 4 unit
		G. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	95%	100%
		- Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola	- 959 surat	- 1165 surat
		- Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	- 3 jenis	- 3 jenis
		- Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	- 1600 meter	- 1600 meter
		H. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	97%	100%
		- Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi izin	- 7 unit	- 7 unit
- Jumlah unit peralatan kantor yang terpelihara	- 3 unit	- 2 unit		
- Jumlah jenis komputer yang terpelihara	-	- 8 unit		

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	F. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp.249.857.300,-	
	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp.249.857.300,-	APBD
	G. Pendampingan dan Asistensi	Rp.174.163.600,-	
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp.77.755.300,-	APBD
	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp.96.408.300,-	APBD
2.	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.218.650.000,-	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.218.650.000,-	APBD
3.	E. Administarsi Umum Perangkat Daerah	Rp.157.965.200,-	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.2.336.500,-	APBD
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.12.735.000,-	APBD
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.14.778.000,-	APBD
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.3.840.000,-	APBD
	- Penyediaan Bahan /Material	Rp.16.441.000,-	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.107.834.700,-	APBD
	F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.76.389.100,-	
	- Pengadaan Meubel	Rp.30.916.100,-	APBD
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.45.473.000,-	APBD
	G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.199.906.450,-	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.30.916.100,-	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.14.866.850,-	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.29.999.800,-	APBD

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.49.731.400,-	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.17.265.000,-	APBD
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp.16.466.400,-	APBD
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	Rp.16.000.000,-	APBD
JUMLAH	Rp.1.081.796.400,-	

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,



H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,



IRNA DJASLIANA, S.Sos.,M.A.P

Pangkat : Penata

NIP : 19820803 200604 2 019



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Wahid Hasyim. No. 12, Kel.Pekkabata, Kec.Polewali
Telp.(0428) 21201 / Faks. (0428) 21201, KodePos 91315

E-mail : inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUSI MAHYANTI, SP**
Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM**
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat :Pembina Tk.I

NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN
DAN PELAPORAN,

SUSI MAHYANTI, SP

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19730808 2002 1 2 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Persentase Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standard dan Tepat Waktu	100%	100%
		- Jumlah dokumen Renja/Perubahan Renja Tahunan yang tersusun sesuai standard dan tepat waktu	- 1 dok	- 1 dok
		- Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)	- 1 dok	- 1 dok
		- Jumlah Dokumen Perubahan RKA	-	- 1 dok
		- Jumlah Laporan LPPD	- 1 dok	- 1 dok

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	Rp.16.785.600,-	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.8.087.100,-	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.3.671.200,-	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.3.712.800,-	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.1.314.500,-	APBD
	JUMLAH	Rp.16.785.600,-	

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,



H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN
DAN PELAPORAN,



SUSI MAHYANTI, SP

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19730808 2002 1 2 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
INSPEKTORAT**

Jalan K.H. Wahid Hasyim. No. 12, Kel.Pekkabata, Kec.Polewali
Telp.(0428) 21201 / Faks. (0428) 21201, KodePos 91315

E-mail : inspektorat@polmankab.go.id, Website : Inspektorat.Polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARSYAN, ST**
Jabatan : Plt. Kasubag Keuangan dan Verifikasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM**
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KABUPATEN,

H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
Plt.KASUBAG KEUANGAN
DAN VERIFIKASI,

MARSYAN, ST

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19740409 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KASUBAG KEUANGAN DAN VERIFIKASI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standard dan Tepat Waktu	99%	100%
		- Jumlah ASN yang masuk dalam daftar gaji/ampra gaji bulanan dalam satu tahun	- 46 org	- 49 org
		- Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	- 32 dok	- 3 dok

NO.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.6.816.238.161,-	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.6.812.190.961,-	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.4.047.200,-	APBD
JUMLAH		Rp.6.816.238.161,-	

Polewali, Januari 2022

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KABUPATEN,



H. ARIFIN YAMBAS, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19701229 199203 1 004

PIHAK PERTAMA
Plt.KASUBAG KEUANGAN
DAN VERIFIKASI,



MARSYAN, ST

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19740409 200604 1 015



BAB III

Akuntabilitas Kinerja



BPK RI

WAKILAN PROVINSI SULAWESI BARU



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Polewali Mandar yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan serta target dan dari indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dipaparkan pula keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, terdapat 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja berserta target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023. Untuk mengetahui sejauhmana pencapaian kinerja tersebut, maka diperlukan pengukuran kinerja yang akan dibahas, dievaluasi dan dianalisis dalam BAB ini. Laporan dimaksud diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian target indikator masing-masing sasaran, perkembangan atau perbandingan kondisi capaian tahun-tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target serta aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masing- masing sasaran.

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Renja.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pada tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang memperlihatkan hasil yang cukup baik.

a. Presentase Perangkat Daerah yang merapkan SPIP

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan monitoring Sistem Penerapan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap sejumlah perangkat daerah yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut :

Tabel : 3 Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Tahun 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Kriteria	Skor
1	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan persandian	Terdefinisi	3,18
2	Dinas transmigrasi, tenaga kerja dan ESDM	Terdefinisi	3,08

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Kriteria	Skor
3	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Terdefinisi	3,30
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terdefinisi	3,30
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terkelola dan terukur	4,30
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terdefinisi	3,09
7	Dinas Sosial	Terdefinisi	3,09
8	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Terkelola dan terukur	4,19
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terkelola dan terukur	4,01
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Terkelola dan terukur	4,01

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar melakukan evaluasi atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada empat belas (14) organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menilai penyelenggaraan SPIP pada organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten Polewali Mandar.
2. Memberikan keyakinan kepada Pimpinan Instansi bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan melalui kegiatan yang efisien, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap perundang- undangan.
3. Memberikan saran perbaikan kepada Pimpinan Instansi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan SPIP pada organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk mencapai tujuan tersebut penilaian penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan ruang lingkup penilaian yang meliputi lima (5) unsur dan dua puluh lima (25) sub unsur SPIP yaitu :

1. Lingkup Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Penilaian penyelenggaraan SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dengan pendekatan kuantitatif mengacu pada 25 sub unsur penyelenggaraan SPIP yaitu :

No	Unsur SPIP	Jumlah Sub Unsur	Bobot
1	Lingkup Pengendalian	8	30%
2	Penilaian Risiko	2	20%
3	Kegiatan Pengendalian	11	25%
4	Informasi dan Komunikasi	2	10%
5	Pemantauan	2	15%
Jumlah		25	

Simpulan hasil penilaian tingkat maturisasi penyelenggaraan SPIP dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil skor akhir untuk masing-masing fokus penilaian (sub unsur) dengan gradasi nilai sebagai berikut :

Kategori Maturitas	Level Maturitas	Interval Nilai
Belum ada	0	$0 < \text{Skor/Nilai} < 1,0$
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Skor/Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Skor/Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Skor/Nilai} < 4,0$
Terkelola dan terukur	4	$4,0 \leq \text{Skor/Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$4,5 \leq \text{Skor/Nilai} < 5,0$

Dari hasil penilaian tingkat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kabupaten Polewali Mandar dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP di kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi kriteria "**terdefinisi**" dan sudah ada 3 (tiga) OPD yang telah mencapai kategori "**terkelola dan terukur**", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan cukup baik. Namun masih ditemukan berbagai kelemahan atas komitmen penyelenggaraan SPIP, untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pemenuhan parameter sebagai indikator dari penerapan SPIP itu sendiri. Kelemahan-kelemahan ini disebabkan berbagai macam faktor antara lain

Minimnya anggaran yang dialokasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

1. Sumber daya manusia masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh satu tim pengawasan terhadap beberapa OPD. Sehingga hal ini mengakibatkan masih banyaknya parameter yang belum maksimal dilakukan akibat dari keterbatasan waktu pelaksanaan evaluasi.

Capaian sasaran terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten Polewali Mandar sebesar 31,11 %.

b. Tingkat Kapabilitas APIP

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamatkan didalam PP nomor 60 Tahun 2008 supaya seluruh tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif.

Hal ini dipertegas oleh Presiden Republik Indonesia pada rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern dengan tema Peningkatan Kapabilitas APIP tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta. Salah satu perintah Presiden adalah agar kapabilitas APIP di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2019 berada pada Level 3 (Integrated), jika dinilai dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) tahun 2009. Sebagaimana diketahui dalam kerangka Internal Audit Capability Model (IACM) kapasitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi lima tingkatan yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Dengan mengacu kepada model yang telah dikembangkan oleh Internal Audit Capability Model (IACM) yaitu Internal Audit Capability Model (IACM) dan telah disesuaikan seperlunya yang mencakup elemen-elemen tata kelola secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada Internal Audit Capability Model mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing)
2. Pengelolaan SDM (People Management)
3. Praktek Profesional (Professional Practices)
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)
5. Budaya dan hubungan organisasi (Organizational Relationship and Culture)
6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures)

Tingkat kapabilitas APIP yang telah diraih oleh Inspektorat kabupaten Polewali Mandar telah mencapai pada tingkat Level 3 (Integrated). Hal ini telah diperoleh sejak tahun 2020, dan tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar berhasil memperhankan tingkat kapabilitas APIP pada tingkat Level 3 (Integrated).

c. Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder

Masyarakat membutuhkan pelayanan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Demikian pula pada Inspektorat kabupaten Polewali Mandar yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepuasan terhadap layan masyarakat/ stakeholder. Kepuasan ini dapat terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan atau lebih baik dari standar pelayanan tersebut.

Inspektorat merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha daerah lainnya dalam mewujudkan **Good Governance**. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016.

Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga terjadi pada Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. penyelesaian pengaduan masyarakat oleh instansi penyelenggara layanan disebut dengan istilah complain handing system yang sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang telah meninstruksikan kepada setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola penagaduan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Inspektorat kabupaten Polewali Mandar telah mencapai kategori **“baik”** dalam hal pelayanan publik, karena telah disediakan Standar Pelayanan Operasional dalam penanganan pelayanan publik. Dan setiap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti dengan membentuk tim pemeriksaasn khusus dalam penanganan pengaduan.

Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengaduan masih terdapat kelemahan yang disebabkan oleh sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar seperti :

1. Kondisi gedung kantor Inspektorat kabupaten Polewali Mandar sudah tidak layak huni dan perlu perbaikan secara maksimal agar masyarakat/stakeholder yang berkunjung ke Inspektorat kabupaten Polewali Mandar dapat merasa nyaman dalam menyampaikan inspirasi.

2. Anggaran yang masih sangat terbatas, sehingga pengaduan masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun kadang tidak dapat ditindak lanjuti segera. Hal ini disebabkan karena anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut tidak memadai.
3. Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang telah dibuat belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan karena SDM yang ada di Inspektorat kabupaten Polewali Mandar masih kurang memadai.

d. Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai 71,95 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah baik namun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah mulai terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,83	23,24
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,86	18,12
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,02	11,29
4.	Evaluasi Internal	10	7,40	7,71
5.	Capaian Kinerja	20	11,65	11,59
	Nilai Hasil Evaluasi	100	0,76	71,95
	Tingkat Akutabilitas Kinerja		BB	BB

e. Opini Pengelolaan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah atau badan lain, diberi kewenangan untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang kemudian memuat opini antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (*disclaimer of opinion*). Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1), yaitu : Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemberian opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Efektivitas Pengendalian Intern;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
- d. Pengungkapan yang Lengkap (Full Disclosure).

Keempat kriteria pemeriksaan di atas akan berdampak terhadap opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikanpun akan semakin buruk. Pelanggaran yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya.

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/ masyarakat).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas (LAK) dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Neraca;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- f. Laporan Arus Kas (LAK) dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaksanaan Akuntansi keuangan daerah tersebut diperlukan keahlian khusus dibidang akuntansi yang ditunjang dengan program aplikasi komputer

(SIMDA) yang handal serta dipayungi dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, yang kemungkinan akan lebih menghambat dalam memperoleh Opini WTP karena diperlukan sumberdaya yang memahami Akuntansi Berbasis Akrua.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar merupakan predikat yang telah disandang seraca berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Sejak audit terhadap LKPD Polewali Mandar tahun 2016. Pada tahun-tahun sebelumnya, opini BPK atas LKPD Polewali Mandar masih pada predikat Wajar Dengan Pengecualian. Pada saat itu predikat WTP masih tersandung oleh karena penyajian data laporan asset yang belum mampu meyakinkan tim auditor BPK RI kala itu.

Opini WTP ini juga akan memberi kontribusi yang besar terhadap penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Polewali Mandar, selain itu opini WTP juga menjadi potensi untuk mendapatkan reward berupa peningkatan nilai Dana Insentif Daerah.

Meskipun mendapatkan opini WTP bukan berarti bahwa pada saat Tim Auditor melakukan audit terhadap LKPD Polewali Mandar sama sekali tidak terdapat temuan-temuan. Akan tetapi temuan-temuan tersebut lebih pada hal-hal yang bersifat administratif, tidak ada temuan yang secara material menyebabkan kerugian negara/daerah

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja



Sasaran 1

Terwujudnya system pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pencapaian sasaran tersebut sebesar 94,02%. Selengkapnya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:



IKU 1

Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase perangkat daerah yg menerapkan SPIP	38,64%	94.02 %	100 %

- **Perbandingan Capaian Indikator Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Dalam 2 Tahun Terakhir**

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Presentase perangkat daerah yg menerapkan SPIP	31,82%	31,11%	98,38%	38,64%	94,02%	100 %



- **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya system pengendalian internal pemerintah (APIP)	Presentase perangkat daerah yg menerapkan SPIP	38,64%	94,02%	100 %

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilaksanakan**

Realisasi kinerja untuk indikator ini 94,02.% dari target yang direncanakan namun nilai capainya 100.% sama dari tahun sebelumnya. Hal ini

Sasaran 2

Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pencapaian sasaran tersebut 3,00 Selengkapnya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 2

Tingkat Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00

□ Perbandingan Capaian Indikator Presentase Tingkat Kapabilitas APIP Dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3,00

□ Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pencapaian sasaran tersebut Baik Selengkapny dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 3

Indeks Kepuasan Masyarakat / Stekholder

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik

□ Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Terpenuhi	Baik	Baik	Terpenuhi

□ Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik

Sasaran 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pencapaian sasaran tersebut BB Selengkapanya dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 4

Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

□ Perbandingan Capaian Indikator Predikat SAKIP perangkat Daerah dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	Terpenuhi	BB	BB	Terpenuhi

□ Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang Pengawasan, dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pencapaian sasaran tersebut WTP Selengkapny dapat dilihat Pencapaian kinerja Utama sebagai berikut:

IKU 5

Opini Pengelolaan Keuangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini Pengelolaan Keaungan	WTP	WTP	WTP

□ Perbandingan Capaian Indikator Opini Pengelolaan Keaungan dalam 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Pengelolaan Keaungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

□ Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keaungan	WTP	WTP	WTP

□ Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perencanaan Kinerja

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 telah berupaya mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET	TAHUN 2022	
				REALISASI	CAPAIAN
1.	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	Terpenuhi
2	Tingkat KapabilitasAPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Terpenuhi

Pada Program *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, target kinerja dan anggaran untuk tahun 2022 sebesar 100% dengan anggaran Rp.10.484.355.075,-. Adapun realisasi anggaran untuk program ini yaitu 95,99%, - atau Rp 10.048.442.419 dengan capaian kinerja sebesar 95,8%

Adapun Kegiatan-Kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* adalah :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah
- 6) Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET	TAHUN 2022	
				REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP	31,11 %	31,82 %	31,11%	98,38 %
2	Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP

Pada Program *Penyelenggaraan Pengawasan*, target kinerja dan anggaran untuk tahun 2022 sebesar 100% dengan anggaran Rp2.424.447.100. Adapun realisasi anggaran untuk program ini yaitu 94,0% atau Rp2.279.582.100,- dengan capaian kinerja sebesar 94,0%

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Program *Penyelenggaraan Pengawasan* adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 2) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

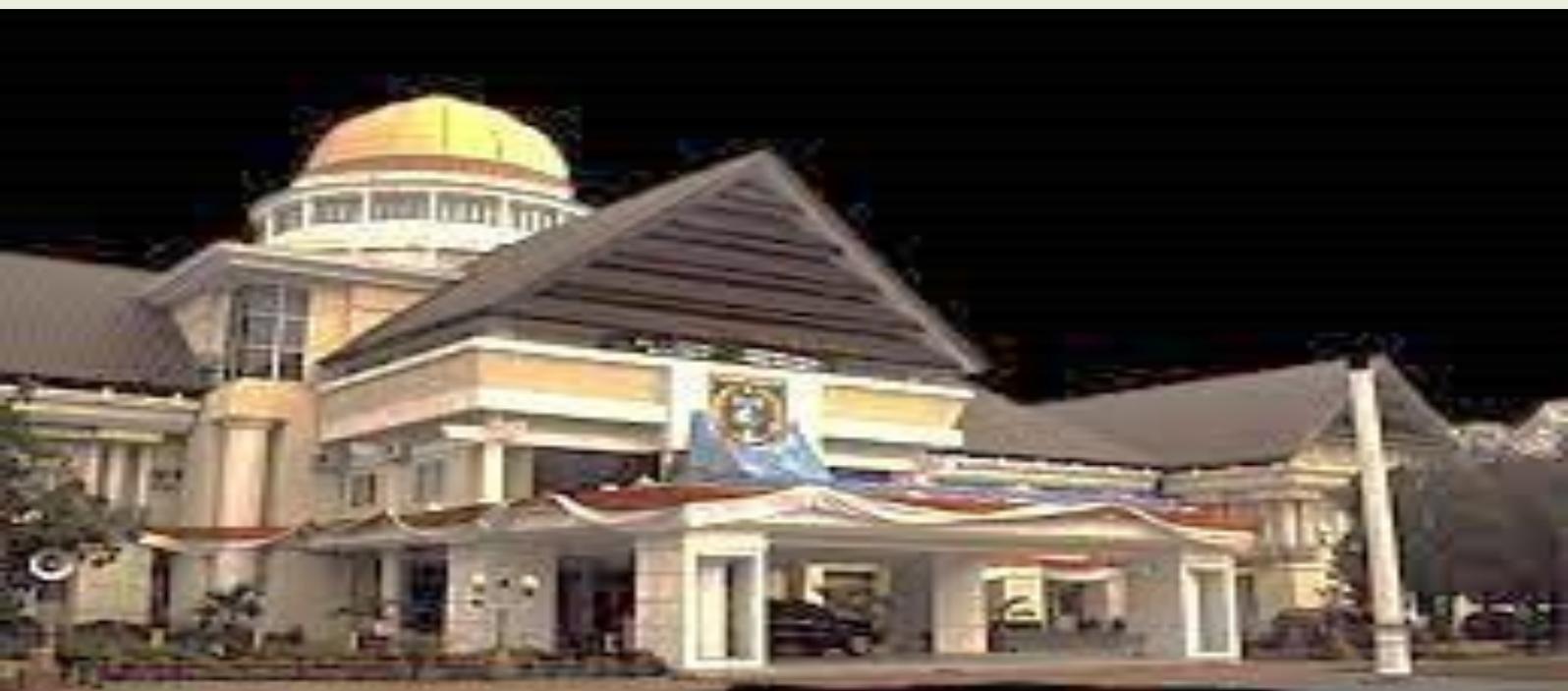
3. Program *Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.*

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	BB	BB	BB	BB

Pada Program *Perumusan kebijakan, Pendampingan dan asistensi* .target kinerja dan anggaran untuk tahun 2022 sebesar 100% dengan anggaran Rp 340.365.800,- Adapun realisasi anggaran untuk program ini yaitu 89,22.% atau Rp.303.685.898,-dengan capaian kinerja sebesar 89,2%

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Program *Perumusan kebijakan, Pendampingan dan asistensi* adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
- 2) Pedampingan dan asistensi.



3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi belanja Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022 sebesar Rp10.484.355.075. Dari jumlah tersebut terealisasi atau 95,99% sebesar Rp10.048.442.419,- dari alokasi belanja yang dianggarkan sebagai berikut :

Tabel 3 20. Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian (%)
I	BELANJA	10.484.355.075,-	10.048.442.419,-	435.912.656	95.99%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Ddaerah	16.785.600	16.785.600	-	100.00
2	Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.271.404.499	5.160.800.428	110.604.071	99.09
3	Belanja Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	716.675.400	663.422.506	53.252.894	93.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.633.400	242.885.698	12.747.702	95.00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.146.391.600	1.103.767.300	42.624.300	96.03
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.450.676	202.800.159	31.650.517	86.05
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.201.000	74.712.730	3.488.270	96.00
II	BELANJA	2.424.447.100	2.279.582.100	144.865.000	94.00
Program Penyelenggaraan Pengawasan					
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.654.099.000	1.564.842.900	89.256.100,-	95.00
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	770.348.100	714.739.200	55.608.900	93,00
III	BELANJA	340.365.800	303.685.898	36.679.902	89.22
Program Pengawasan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi					
1	Perumusan Kebijakan Teknis I bidang Pengawasan & Fasilitas Pengawasan	-	-		
2	Pendampingan Dan Asistensi	340.365.800	303.685.898	36.679.902	89.22
BELANJA I + II + III		10.484.355.075	10.048.442.419	435.412.656	95.99

Lakip 2022

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Inspektorat kabupaten polewali mandar cukup baik karena mampu menyerap anggaran sebesar Rp10.484.355.075.dari alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 10.048.442.419,dengan penurunan penyerapan anggaran. sebesar 95,99 % dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 Penyerapan anggaran sebesar 98,98%. Pada tahun ini ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak dapat terserap dengan baik

Hasil analisis keuangan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar diperoleh persentase kurang dari 100% dari target yang direncanakan. Untuk Belanja diperoleh persentase sebesar 95,99%.





BAB IV

Penutup

WORLD A

CGCAE

DAI

CI

ASI MENC

BANGU



BAB IV PENUTUP

Capaian kinerja Tahun 2022 Inspektorat kabupaten polewali mandar sebesar 95,99..%. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU yang telah diperjanjikan di awal tahun. IKU sasaran pertama memperoleh capaian% dan IKU pertama sasaran kedua memperoleh capaian Level 3, IKU dua memperoleh Capaian Baik Sasaran 3 IKU tiga memperoleh Baik Sasaran 4 IKU empat memperoleh BB. Sasaran 5 IKU 5 memperoleh Nilai WTP. Dalam mengatasi kendala yang terjadi pada semester I tahun 2022, Inspektorat kabupaten polewali mandar terus mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh stakeholder dan berupaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan pengawasan Untuk itu Sekretariat inspektorat kabupaten polewali mandartelah melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan melalui hasil pemetaan risiko di lingkungan inspektorat kabupaten polewali mandar ,yang digunakan sebagai panduan untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, dan menyukseskan seluruh pelayanan yang diberikan kepada stakeholders.

Disamping itu, pengelolaan manajemen inspektorat kabupaten polewali mandartelah perlu memadukan beberapa elemen terkait sistem pembinaan pengawasan , sistem pemantauan, dan sistem pelaporannya. Sejalan dengan saran penyempurnaan dari Kementerian PANRB guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, Sekretariat inspektorat kabupaten polewali mandar telah secara berkelanjutan melakukan penguatan e-government melalui penyempurnaan sistem informasi yang telah diimplementasikan selama ini.

Melalui penyempurnaan sistem informasi tersebut, diharapkan dapat mendukung upaya reformasi proses kerja internal inspektorat kabupaten polewali mandartelah melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam memberikan dukungan manajemen kepada Bupati dan Wakil.

Pada sisi lain, dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi saat ini, menyebabkan banyak perubahan, baik dari sisi tatanan kerja maupun anggaran. paradigma tatanan kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Terlihat dari percepatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP yang telah menjadi kebutuhan pada semua level birokrasi, sebagai konsekuensi masifnya praktik bekerja dari rumah atau work from home.

Rapat-rapat koordinasi juga diselenggarakan menggunakan teknologi digital melalui video conference sehingga lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan biaya.

Tantangan inspektorat kabupaten polewali mandartelah ke depan adalah memperkuat sumber daya manusia yang kompeten, dapat berinovasi, dan beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi digital dalam berkinerja ditengah pandemi covid-19, sehingga dapat memberikan outcome yang bermanfaat bagi inspektorat kabupaten polewali mandartelah dalam memberikan dukungan manajemen kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, Laporan Capaian Kinerja Semester I inspektorat kabupaten polewali mandar telah Tahun 2022 ini akan menjadi bahan evaluasi dan digunakan untuk menyempurnakan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengukuran pelaksanaan kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan dalam Untuk pengukuran kinerja sesuai dengan indikator kinerjanya masih ada beberapa sasaran yang telah dicapai selama tahun 2022.

dengan tingkat capaian hanya menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Dinas tata ruang. Hal ini terpapar dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan untuk menilai dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / misi organisasi selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat. hal tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum, capaian kinerja yang telah ditargetkan untuk setiap sasaran maupun kegiatan telah dicapai melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan rencana pencapaian target dengan realisasi pencapaiannya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja kegiatan secara keseluruhan terlaksana dengan kategori cukup baik, sebesar ,95,99%

